



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Mei 2016

Halaman: 9

PEMKOT-BPJS KESEHATAN JALIN KERJA SAMA

Warga Miskin Dijamin Masuk Kuota Kepesertaan

YOGYA (KR) - Warga miskin penduduk Kota Yogyakarta dijamin bakal masuk dalam kuota kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemkot Yogyakarta bersama BPJS Kesehatan sudah memiliki kesepakatan untuk menyisir bersama agar tidak ada warga miskin yang terlewat.

"MoU ini jadi dasar kita bisa diperpanjang. Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) BPJS Kesehatan Yogyakarta, dr Upik Handayani mengungkapkan, total cakupan atau kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta merupakan yang tertinggi di DIY. Yaitu berada di kisaran 84,4 persen atau 344.121 jiwa, sedangkan kabupaten lain rata-rata baru 74 persen.

Terkait kuota PBI yang dibayai dari APBN, Kota Yogyakarta mendapatkan porsi 114.647 jiwa. Penerima kuota tersebut pun didasarkan pada data pemerintah pusat. Namun data penerima perlu diverifikasi kembali guna memastikan yang sudah meninggal dunia maupun sudah terjamin secara mandiri atau di perusahaan tempatnya bekerja. "Dalam proses pendataan, sangat memungkinkan ada perbedaan data. Makanya perlu ada kerja sama dengan pemkot yang mengetahui secara detail kondisi warganya," papar Upik.

Oleh karena itu, jika ada penduduk miskin yang masih terlewat atau belum masuk dalam kuota, maka tetap dapat masuk PBI dengan pembiayaan dari APBD Kota Yogyakarta. Validitas data kepesertaan BPJS Kesehatan ini pun sangat penting sebelum ada proses integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"MoU ini jadi dasar kita bisa diperpanjang. Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) BPJS Kesehatan Yogyakarta, dr Upik Handayani mengungkapkan, total cakupan atau kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta merupakan yang tertinggi di DIY. Yaitu berada di kisaran 84,4 persen atau 344.121 jiwa, sedangkan kabupaten lain rata-rata baru 74 persen.

Terkait kuota PBI yang dibayai dari APBN, Kota Yogyakarta mendapatkan porsi 114.647 jiwa. Penerima kuota tersebut pun didasarkan pada data pemerintah pusat. Namun data penerima perlu diverifikasi kembali guna memastikan yang sudah meninggal dunia maupun sudah terjamin secara mandiri atau di perusahaan tempatnya bekerja. "Dalam proses pendataan, sangat memungkinkan ada perbedaan data. Makanya perlu ada kerja sama dengan pemkot yang mengetahui secara detail kondisi warganya," papar Upik.

Oleh karena itu, jika ada penduduk miskin yang masih terlewat atau belum masuk dalam kuota, maka tetap dapat masuk PBI dengan pembiayaan dari APBD Kota Yogyakarta. Validitas data kepesertaan BPJS Kesehatan ini pun sangat penting sebelum ada proses integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jalinan kerja sama antara Walikota Yogyakarta dengan Kepala KCU BPJS Kesehatan Yogyakarta.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar mengungkapkan, proses validasi data penerima PBI tersebut akan dilakukan tiap enam bulan sekali. Setiap Januari dan Juli, pihaknya selalu melakukan perkembangan data ke pemerintah pusat melalui

Instansi

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☐ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

Kepala

Ttd

(Dh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005